

## Dampak Kebijakan Pupuk Bersubsidi Terhadap Pendapatan Bersih Usatani Padi Sawah Berdasarkan Permentan No 10 Tahun 2022 di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Surya Abadi Sembiring<sup>1</sup>, Maryanti Sitohang<sup>2</sup>, Mai Fernando Nainggolan<sup>3</sup>, Elma Desriana Sinaga<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Unika Santo Thomas

E-mail: [suryasembiring1961@gmail.com](mailto:suryasembiring1961@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui: (1) biaya pupuk dengan adanya kebijakan pupuk bersubsidi dan tanpa kebijakan pada usahatani padi sawah, (2) perbedaan total biaya produksi dengan adanya kebijakan pupuk bersubsidi pada usahatani padi sawah, (3) pendapatan bersih dengan adanya kebijakan pupuk bersubsidi. Penelitian dilakukan di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang ditentukan secara *purposive* (sengaja). Penentuan sampel dilakukan dengan *simple random sampling*, sedangkan besaran sampel ditentukan dengan rumus Slovin sehingga diperoleh 81 sampel. Biaya pupuk dengan kebijakan pupuk bersubsidi Rp2.231.228/Ha/MT, sedangkan biaya pupuk tanpa kebijakan Rp 7.134.604/Ha/MT. Pengeluaran total usaha tani tanpa kebijakan Rp25.783.727/Ha/MT, sedangkan Pengeluaran total usaha tani dengan kebijakan Rp20.880.381/Ha/MT. Pendapatan bersih usahatani padi sawah dengan kebijakan Rp 57.780.471/Ha/MT, sedangkan pendapatan bersih usahatani padi sawah tanpa kebijakan Rp 52.877.095/Ha/MT.

**Kata Kunci:** kebijakan pupuk bersubsidi, pendapatan bersih, penghematan biaya, Pengeluaran total usaha tani

### Abstract

*This study aims to find out: (1) fertilizer costs with subsidized fertilizer policies and without policies on paddy rice farming, (2) differences in total production costs with subsidized fertilizer policies on paddy rice farming, (3) net income with subsidized fertilizer policies. The research was conducted in Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency which was determined purposively (deliberately). The determination of the sample was carried out by a simple random sampling method, to measure the size of the sample, the Slovin formula was used so that 81 samples were obtained. The data used in this study are primary data and secondary data. The cost of fertilizer with a subsidized fertilizer policy is Rp2,231,228/Ha/MT, while the cost of subsidized fertilizer without a policy is Rp7,134,604/Ha/MT, indicating a cost savings received by farmers of Rp4,903,376/Ha/MT. Total farm expenses without policy is Rp25,783,727/Ha/MT, while the total cost with policy is Rp20,880,381/Ha/MT shows a difference in the total farm expenses by farmers of Rp4,903,376/Ha/MT. The net farm income of paddy rice farming with a policy is Rp57,780,471/Ha/MT, while the net income of paddy rice farming without a policy is Rp52,877,095/Ha/MT. It shows a difference in the net farm income received by farmers of Rp4,903,376/Ha/MT.*

**Keywords:** *subsidized fertilizer policy, net farm income, cost savings, total farm expenses*

### PENDAHULUAN

Beberapa negara produsen beras di Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara mengimplementasikan kebijakan input seperti pupuk bersubsidi kepada petani (Tobias et al, 2012). Dengan adanya kebijakan pupuk bersubsidi diharapkan produksi meningkat (Darwis dan Supriyati 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 41 Tahun 2021

tentang pupuk bersubsidi terdiri dari pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk anorganik terdiri atas : Urea, Superfosfat (SP-36), Zvavelvuure Ammonium (ZA), Nitrogen, Phospor, Kalium (NPK). Sementara pada Permendag No. 04 Tahun 2023 jenis pupuk bersubsidi terdiri dari: Urea dan NPK. Pembatasan jumlah pupuk bersubsidi akan meningkatkan biaya pupuk sehingga mempengaruhi pendapatan petani.

**Tabel 1. Alokasi Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Utara**

Jenis Pupuk bersubsidi	Permentan No.47/2018	Permentan No.10/2020	Permentan No.49/2020	Permentan No.36/2021	Permentan No.10/2022
Urea (Ton)	98.893	130.123	154.917	156.156	239.975
SP-36 (Ton)	32.155	28.159	38.907	37.157	-
ZA (Ton)	29.107	35.055	34.008	49.893	-
NPK (Ton)	78.129	107.201	114.112	109.243	148.676
Organik (Ton)	15.625	16.591	19.918	30.201	-

Sumber : Permentan 2018-2022

Berdasarkan Tabel 1 alokasi pupuk bersubsidi anorganik Urea secara umum menunjukkan tren meningkat sedangkan pupuk SP-36, ZA dan NPK fluktuatif yang alokasi pupuk bersubsidi di semua jenis pupuk subsidi menurun. Pada Permentan No. 10 tahun 2020 alokasi pupuk bersubsidi mengalami kenaikan kecuali pupuk subsidi SP-36. Pada Permentan No. 49 tahun 2020 alokasi pupuk subsidi mengalami kenaikan kecuali pupuk ZA. Pada Permentan 36 tahun 2021 alokasi pupuk bersubsidi meningkat dibandingkan Permentan No. 49 tahun 2020 kecuali alokasi pupuk subsidi SP-36 dan NPK. Pada Permentan No. 10 tahun 2020 alokasi pupuk meningkat dibandingkan Permentan No. 36 tahun 2021

pupuk Urea dan pupuk NPK. Pada Permentan No. 10 Tahun 2022 terdapat pupuk bersubsidi NPK formula khusus sebanyak 7.692 ton. Salah satu tujuan kebijakan pemberian subsidi pupuk adalah untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk bersubsidi untuk usaha taninya sehingga dapat meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan. Alur distribusi pupuk bersubsidi telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Permendag No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

**Tabel 2. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Lima Tahun Terakhir**

Tahun	HET Pupuk Bersubsidi						
	Urea (Rp/Kg)	SP-36 (Rp/Kg)	ZA (Rp/Kg)	NPK (Rp/Kg)	NPK Formula Khusus	Organik Granul (Rp/Kg)	Organik Cair (Rp/Kg)
2019	1.800	2.000	1.400	2.300	-	500	-
2020	2.250	2.400	1.700	2.300	3.000	800	20.000
2021	2.250	2.400	1.700	2.300	3.000	800	20.000
2022	2.250	-	-	2.300	3.000	-	-
2023	2.250	-	-	2.300	-	-	-

Sumber : Direktorat Jenderal Sarana Dan Prasarana Pertanian Tahun 2019-2023

Berdasarkan Tabel 2, harga pupuk bersubsidi mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu pupuk Urea, SP-36, ZA, Organik Granul, sementara pupuk NPK formula khusus mengalami kenaikan harga pada tahun 2022. Disisi lain harga subsidi pupuk NPK tetap dari tahun 2019-2023.

Semakin tinggi rasio harga pupuk non-subsidi dengan pupuk subsidi semakin tinggi penghematan biaya pupuk bersubsidi baik pada pupuk urea dan NPK (Sembiring et al (2024)

Pembatasan pupuk bersubsidi pada Permentan No. 10 Tahun 2022, mengakibatkan biaya produksi pupuk meningkat dikarenakan permintaan selain pupuk bersubsidi Urea, NPK

menyebabkan biaya yang dikeluarkan petani untuk pupuk semakin meningkat. Peningkatan biaya pupuk menyebabkan biaya pengeluaran naik sehingga mempengaruhi penghasilan bersih usaha tani padi sawah.

Sembiring dan Hutaeruk (2018) menunjukkan bahwa kenaikan realisasi distribusi pupuk bersubsidi ZA dan NPK menyebabkan harga pupuk bersubsidi ZA dan NPK menurun, sedangkan kenaikan harga pupuk bersubsidi menyebabkan produktivitas padi turun. Larasati el al (2022) menunjukkan penggunaan pupuk bersubsidi menyebabkan biaya produksi berkurang sebesar 5 persen. Penelitian ini mengetahui pendapatan bersih

usahatani dengan adanya kebijakan pupuk bersubsidi.

## METODE PENELITIAN

Penentuan lokasi penelitian ditentukan secara *purposive sampling* (sengaja). Adapun alasan penentuan daerah karena Kecamatan Perbaungan merupakan daerah terbanyak pertama alokasi pupuk bersubsidi pada tingkat Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai. Populasi dalam penelitian ini adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani. Untuk mengukur sampel dari populasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 81 KK.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi dengan meninjau ke lapangan dan memberikan kuesioner yang telah disusun sebelumnya, Dinas Pertanian, Badan Penyuluhan, Kantor Kepala Desa dan pihak lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini serta melalui literatur-literatur penunjang lainnya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Metode analisis untuk menghitung pengeluaran biaya antara pupuk subsidi dan pupuk non subsidi (Soekartawi *et al.*, 1984) :

1. Menghitung total biaya (pengeluaran) :

$$TFE = TFC + TVC$$

Dimana :

TFE = Pengeluaran Total

TFC = Biaya Tetap Total

TVC = Biaya Variabel Total

Menghitung biaya pupuk subsidi :

$$VC_s = Q \times P_s$$

Dimana :

$VC_s$  = Biaya Variabel Pupuk Bersubsidi

$Q$  = Jumlah pupuk bersubsidi dibeli petani (Kg)

$P_s$  = Harga pupuk bersubsidi (Rp/Kg)

2. Menghitung biaya pupuk non subsidi :

$$VC_{ns} = Q \times P_{ns}$$

Dimana :

$VC_{ns}$  = Biaya Variabel Pupuk Non Subsidi

$Q$  = Jumlah pupuk subsidi dibeli petani (Kg)

**Tabel 3. Rata-rata Biaya Pupuk Subsidi Dengan Kebijakan Pada Usahatani Padi Sawah Musim Tanam II (Oktober 2023 - Januari 2024) di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.**

$P_{ns}$  = Harga pupuk non subsidi (Rp/Kg)

Metode analisis untuk menghitung pendapatan kotor usahatani padi sawah:

Pendapatan Kotor Usahatani (*Gross farm income*):

$$GFI = Q_s \times P_s + Q_c \times P_c + Q_b \times P_b + Q_h \times P_h + Q_s \times P_s$$

Dimana :

$Q_s$  = Produk gabah yang dijual (Kg)

$Q_c$  = Produk gabah yang dikonsumsi (kg)

$Q_b$  = Produk gabah yang digunakan untuk bibit atau makanan ternak (Kg)

$Q_h$  = Produk gabah yang digunakan untuk pembayaran (Kg)

$Q_s$  = Produk gabah yang disimpan atau ada digudang sampai akhir tahun (Kg)

$P_s$  = Harga Produk gabah yang dijual (Rp/Kg)

$P_c$  = Harga Produk gabah yang dikonsumsi (Rp/Kg)

$P_b$  = Harga Produk gabah yang digunakan untuk bibit atau makanan ternak (Rp/Kg)

$P_h$  = Harga Produk gabah yang digunakan untuk pembayaran (Rp/Kg)

$P_s$  = Harga Produk gabah yang disimpan (Rp/Kg)

Metode analisis untuk menghitung pendapatan bersih :

$$NFI = GFI - TC$$

Dimana :

NFI = Pendapatan Bersih Usahatani

GFI = Pendapatan Kotor Usahatani

TC = Total Biaya

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Biaya Pupuk Subsidi dengan Kebijakan dan Tanpa Kebijakan

Tabel 3 menunjukkan pengeluaran pupuk bersubsidi urea tidak berbeda jauh dari pengeluaran NPK meskipun harga beli pupuk urea Rp 3.200 lebih rendah dari Rp 3.300 per kg. Biaya pupuk NPK adalah sebesar Rp1.075.800/Ha/MT dengan jumlah rata-rata 326 Kg/Ha/MT. Harga pupuk Urea dengan kebijakan adalah Rp3.200, NPK Rp3.300.

No.	Uraian	Urea		NPK	
		Per Petani	Per Hektar	Per Petani	Per Hektar
1.	Jumlah Pupuk(Kg)	222,81	364,6	192,9	326
2.	Harga Pupuk (Rp/Kg)	3.200	3.200	3.300	<b>3.300</b>
<b>Biaya Variabel Pupuk Bersubsidi Dengan Kebijakan (Rp)</b>		<b>712.976</b>	<b>1.166.720</b>	<b>636.570</b>	<b>1.075.800</b>

Sumber : Hasil perhitungan peneliti

Tabel 3. menunjukkan biaya variabel pupuk bersubsidi dengan kebijakan Urea adalah sebesar Rp1.166.720/Ha/MT dengan jumlah rata-rata 222,81Kg/Ha/MT. Biaya pupuk NPK

adalah sebesar Rp1.075.800/Ha/MT dengan jumlah rata-rata 326 Kg/Ha/MT. Harga pupuk Urea dengan kebijakan adalah Rp3.200, NPK Rp3.300.

**Tabel 4. Rata-rata Biaya Pupuk Subsidi Tanpa Kebijakan Pada Usahatani Padi Sawah Musim Tanam II (Oktober 2023 - Januari 2024) di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.**

No.	Uraian	Urea		NPK	
		Per Petani	Per Hektar	Per Petani	Per Hektar
1.	Jumlah Pupuk(Kg)	222,81	364,6	192,9	326
2.	Harga Pupuk (Rp/Kg)	7.000	7.000	14.000	14.000
<b>Biaya Variabel Pupuk Bersubsidi Tanpa Kebijakan (Rp)</b>		<b>1.559.670</b>	<b>2.552.200</b>	<b>2.700.600</b>	<b>4.564.000</b>

Sumber : Hasil perhitungan peneliti

Tabel 4. menunjukkan biaya variabel pupuk subsidi tanpa kebijakan,Urea adalah sebesar Rp2.552.200/Ha/MT dengan jumlah

rata-rata 326Kg/Ha/MT. Biaya pupuk NPK adalah sebesar Rp4.564.000/Ha/MT dengan jumlah rata-rata 170,00 Kg/Ha/MT.

**Tabel 5. Penghematan Biaya Pupuk Subsidi Dengan Kebijakan Dan Tanpa Kebijakan Pada Usahatani Padi Sawah Musim Tanam II (Oktober 2023 - Januari 2024) di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.**

No.	Uraian	Biaya Pupuk(Rp)	
		Per Petani	Per Hektar
1.	Pupuk Subsidi Dengan Kebijakan	1.338.749	2.231.228
2.	Pupuk Subsidi Tanpa Kebijakan	4.254.122	7.134.604
3.	<b>Penghematan Biaya Pupuk</b>	<b>2.915.373</b>	<b>4.903.376</b>

Sumber : Hasil perhitungan peneliti

Tabel 5. menunjukkan bahwa biaya pupuk subsidi tanpa kebijakan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pupuk subsidi dengan adanya kebijakan. Pada Tabel 5 juga menunjukkan adanya penghematan biaya diterima petani sebesar Rp4.903.376/Ha/MT. Menurut Larasati *et al.*,(2022) pupuk merupakan salah satu input penting dalam Biaya Produksi Usahatani

meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Pupuk subsidi dalam hal ini bermanfaat dalam penekanan biaya produksi dimana petani yang menerima pupuk subsidi dapat membeli pupuk dengan harga lebih terjangkau.

## **B. Pengeluaran Usahatani Padi Sawah di Daerah Penelitian.**

**Tabel 6. Biaya Total Produksi Dengan Kebijakan Pada Usahatani Padi Sawah Musim Tanam II (Oktober 2023 - Januari 2024) di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.**

No.	Uraian	Biaya Total Produksi	
		Per Petani	Per Hektar
1.	Biaya Variabel		
	Benih	592.365	908.719
	Pupuk Subsidi*	1.338.749	2.231.228
	Pupuk nonsubsidi	513.903	569.004
	Obat-obatan	1.120.605	1.767.563
	Tenaga Kerja	9.641.805	13.265.117
	<b>Sub Total</b>	<b>13.207.427</b>	<b>18.741.631</b>
2.	Biaya Tetap		
	Penyusutan Alat	605.415	1.002.954
	Sewa Lahan	451.830	897.963
	Pajak Lahan	176.769	237.805
	<b>Sub Total</b>	<b>1.234.014</b>	<b>2.138.722</b>
	<b>Total</b>	<b>14.441.441</b>	<b>20.880.353</b>

Sumber: Hasil perhitungan Peneliti. Keterangan : \* Pupuk Subsidi dengan kebijakan

Dari Tabel 6. menunjukkan bahwa rata-rata sarana produksi benih di daerah penelitian adalah sebesar Rp908.719/Ha/MT, biaya pupuk subsidi dengan kebijakan sebesar Rp2.231.228/Ha/MT, biaya pupuk nonsubsidi

sebesar Rp569.004/Ha/MT dan biaya pestisida sebesar Rp1.767.563/Ha/MT. Total biaya sarana produksi dengan kebijakan adalah sebesar Rp20.880.353/Ha/MT.

**Tabel 7. Biaya Total Produksi Tanpa Kebijakan Pada Usahatani Padi Sawah Musim Tanam II (Oktober 2023 - Januari 2024) di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.**

No.	Uraian	Biaya Total Produksi	
		Per Petani	Per Hektar
1.	Biaya Variabel		
	Benih	592.365	908.719
	Pupuk Subsidi*	4.254.122	7.134.604
	Pupuk nonsubsidi	513.903	569.004
	Obat-obatan	1.120.605	1.767.563
	Tenaga Kerja	9.641.805	13.265.117
	<b>Sub Total</b>	<b>16.122.800</b>	<b>23.645.007</b>
2.	Biaya Tetap		
	Penyusutan Alat	605.415	1.002.954
	Sewa Lahan	451.830	897.963
	Pajak Lahan	176.769	237.805
	<b>Sub Total</b>	<b>1.234.014</b>	<b>2.138.722</b>
	<b>Total</b>	<b>17.356.814</b>	<b>25.783.729</b>

Sumber: Hasil perhitungan peneliti, Keterangan : \*\*Pupuk Subsidi tanpa kebijakan

Tabel 7. menunjukkan bahwa biaya variabel adalah sebesar Rp13.265.117/Ha/MT, biaya variabel terdiri dari biaya benih, pupuk subsidi tanpa kebijakan, obat-obatan dan biaya tenaga kerja.

Sedangkan total biaya tetap adalah sebesar Rp2.138.722/Ha/MT, biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan alat, sewa lahan dan pajak lahan. Tabel 7 menunjukkan bahwa biaya total produksi tanpa kebijakan pada usahatani padi sawah sebesar Rp25.783.729/Ha/MT.



**Tabel 8. Perbandingan Biaya Total Produksi Dengan Kebijakan Dan Tanpa Kebijakan Pada Usahatani Padi Sawah Musim Tanam II (Oktober 2023 - Januari 2024) di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.**

No.	Biaya Total Produksi	Biaya Pupuk(Rp)	
		Per Petani	Per Hektar
1.	Biaya Total Produksi Dengan Kebijakan	14.441.441	20.880.351
2.	Biaya Total Produksi Tanpa Kebijakan	17.356.814	25.783.727
	<b>Perbandingan Biaya Total Produksi</b>	<b>2.915.373</b>	<b>4.903.376</b>

*Sumber : Hasil perhitungan Peneliti*

Tabel 8. menunjukkan bahwa biaya total produksi dengan kebijakan adalah Rp20.880.351/Ha/MT, biaya total produksi tanpa kebijakan Rp25.783.727/Ha/MT, menunjukkan bahwa biaya total produksi tanpa kebijakan lebih tinggi dibandingkan dengan

biaya total produksi dengan adanya kebijakan. Pada tabel juga menunjukkan cdw adanya perbedaan biaya total produksi petani dengan adanya kebijakan pupuk bersubsidi sebesar Rp4.903.376/Ha/MT.

### **C. Pendapatan Bersih Dengan Kebijakan Dan Tanpa Kebijakan Usahatani Padi Sawah.**

Pendapatan bersih usahatani adalah pendapatan kotor dikurangi dengan biaya total produksi usahatani. Pendapatan bersih sangat tergantung pada dua faktor yaitu penerimaan dan biaya. Besarnya penerimaan dan pendapatan bersih rata-rata usahatani padi sawah di daerah penelitian dapat dilihat pada berikut:

**Tabel 9. Pendapatan Bersih Dengan Kebijakan Usahatani Padi Sawah Musim Tanam II (Oktober 2023 - Januari 2024) di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per Petani	Per Hektar
1.	Pendapatan Kotor (Rp)	56.694.756	78.660.822
2.	Biaya Produksi (Rp)	14.441.441	20.880.351
3.	<b>Pendapatan Bersih (Rp)</b>	<b>42.253.315</b>	<b>57.780.471</b>

*Sumber : Hasil perhitungan peneliti*

Tabel 9 menunjukkan bahwa besar pendapatan kotor dengan kebijakan usahatani padi sawah sebesar Rp 78.660.822/Ha/MT. Biaya produksi adalah sebesar Rp20.880.351/Ha/MT. Pendapatan bersih

usahatani padi sawah diperoleh dari pendapatan kotor dikurangi biaya produksi. Besarnya pendapatan bersih usahatani padi sawah sebesar Rp57.780.471/Ha/MT.

**Tabel 10. Pendapatan Bersih Tanpa Kebijakan Usahatani Padi Sawah Musim Tanam II (Oktober 2023 - Januari 2024) di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per Petani	Per Hektar
1.	Pendapatan Kotor(Rp)	56.694.756	78.660.822
2.	Biaya Produksi(Rp)	17.356.814	25.783.727
3.	<b>Pendapatan Bersih(Rp)</b>	<b>39.337.942</b>	<b>52.877.095</b>

*Sumber : Hasil perhitungan peneliti*

Tabel 9 menunjukkan bahwa besar pendapatan kotor tanpa kebijakan usahatani padi sawah sebesar Rp78.660.822/Ha/MT.

Pendapatan bersih usahatani padi sawah diperoleh dari pendapatan kotor dikurangi biaya produksi total. Besarnya pendapatan

bersih usahatani padi sawah sebesar  
 Rp52.877.095/Ha/MT.

**Tabel 11. Perbandingan Pendapatan Bersih Dengan Kebijakan Dan Tanpa Kebijakan Pada Usahatani Padi Sawah Musim Tanam II (Oktober 2023 - Januari 2024) di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.**

No.	Uraian	Biaya Pupuk(Rp)	
		Per Petani	Per Hektar
1.	Pendapatan Bersih Dengan Kebijakan(Rp)	42.253.315	57.780.471
2.	Pendapatan Bersih Tanpa Kebijakan(Rp)	39.337.942	52.877.095
	<b>Perbandingan Pendapatan Bersih</b>	<b>2.915.373</b>	<b>4.903.376</b>

Sumber : Hasil perhitungan peneliti

Pada Tabel 11 menunjukkan adanya perbandingan antara pendapatan bersih tanpa kebijakan dan dengan kebijakan sebesar Rp 4.903.376/Ha/MT.

## KESIMPULAN

1. Biaya rata-rata pupuk dengan kebijakan pupuk bersubsidi Rp1.196.701/Ha/MT, sedangkan biaya rata-rata pupuk subsidi tanpa kebijakan Rp3.777.351/Ha/MT.
2. Pengeluaran total usahatani tanpa kebijakan Rp13.059.859/Ha/MT, sedangkan pengeluaran total usahatani dengan kebijakan Rp10.479.209/Ha/MT.
3. Pendapatan bersih usahatani padi sawah dengan kebijakan Rp27.848.750/Ha/MT, sedangkan pendapatan bersih usahatani padi sawah tanpa kebijakan Rp25.268.100/Ha/MT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Sarana dan Prasarana 2019. *Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019*.
- Darwis, V dan Supriyati. 2013. *Subsidi Pupuk Kebijakan Pelaksanaan dan Optimalisasi Pemanfaatannya. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 11 No.(1), Hal 45-60.
- Direktorat Jendral Sarana dan Prasarana 2020. *Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020*.
- Direktorat Jendral Sarana dan Prasarana 2021. *Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021*.
- Direktorat Jendral Sarana dan Prasarana 2022. *Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022*.

Direktorat Jendral Sarana dan Prasarana 2023. *Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023*.

Larasati A, Antoni M, Lifianthi. 2022. *Penggunaan Pupuk Subsidi Dalam Menekan Biaya Produksi Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Di Kecamatan Tanjung Lago. Jurnal Ilmah Akuntansi Dan Keuangan*. Volume 4 No. (10).

Peraturan Menteri Perdagangan. No. 4 Tahun 2023. *Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian. No. 10 Tahun 2020. *Perubahan Atas Peraturan Pertanian No 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020*. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian. No. 10 Tahun 2022. *Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023*. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian. No. 36 Tahun 2021. *Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022*. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian. No. 41 Tahun 2021. *Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022*. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian. No. 47 Tahun 2018. *Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor*

- Pertanian Tahun Anggaran 2019.* Jakarta.
- Peraturan Menteri Pertanian. No. 49 Tahun 2020. *Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.* Jakarta.
- Sembiring S.A and Julia Hutaaruk. 2018. *Econometric Model of Rice Policy Based on Presidential Instruction. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering* 300 (2018) 012028 doi:10.1088/1757899X/300/1/012028.
- Sembiring, SA, Hutaaruk, J, Saragi, CPH, Nainggolan MF, Simbolon, SP dan Tarigan, J. 2024. Implementation of fertilizer subsidy policy to fertilizer cost saving based on Indonesian minister of agriculture regulations .IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science **1413** (2024) 012095
- Soekartawi, Soeharjo A, Dillon J. L. Hardaker J. B. 1984. *Ilmu Usahatani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil.* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tobias, A, Molina I, Valera, HG, Mottaleb, KA, Mohanty S. 2012. Handbook on rice policy for Asia. Los Banos: International Rice Research Institute.